BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.846.969 jiwa yang merupakan salah satu penyokong penduduk miskin di provinsi Jawa Barat.

Tabel 1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase (%)
2018	153.480 jiwa	10,92%
2019	149.730 jiwa	10,51%
2020	162.520 jiwa	11,33%
2021	159,140 jiwa	10,92%
2022	158.070 jiwa	10,52%

Berdasarkan tabel 1.1 presentase kemiskinan Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2018-2022 mayoritas mengalami penurunan. Kecuali pada tahun 2020 mengalami peningkatan dikarenakan adanya dampak dari Covid-19. Dimana keadaan tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia, sehingga terjadilah kesenjangan sosial antara golongan mampu dan kurang mampu. Sehingga perlu adanya bantuan dana untuk mengurangi permasalahan ini. Sebagian masyarakat yang mengalami dampak kesenjangan sosial ini mereka hidup dalam sektor usaha mikro.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan sektor usaha produktif, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum merasakan dukungan tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka perlunya menentukan metode atau instrumen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Islam memiliki instrumen khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam ekonomi, sehingga berfungsi mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, salah satu intrumennya ialah zakat. Zakat merupakan salah satu dari bagian dari instrumental dalam menangani kemiskinan, sebab masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, sadaqah wasiat, hibah serta sejenis lainnya. Sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang berfungsi sebagai upaya pemecahan masalah kemiskinan sosial.

Agar zakat dapat memberikan pengaruh yang baik pada bidang perekonomian masyarakat. Maka potensi zakat harus dioptimalkan dengan baik. Pendistribusian zakat sebaiknya memprioritaskan untuk membangun usaha yang produktif bagi penerima zakat yang mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bisa membuka lapangan pekerjaan.

Zakat adalah ibadah maliyah ijtimai'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun islam mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban

shalat¹. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

Diantaranya Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran islam², terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 5, yaitu:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.

Dalam hal ini peranan pengelolaan dana ZIS di suatu lembaga juga sangat penting agar dana zakat dapat tersalurkan secara baik dan terarah. ZIS

¹ Fatchiatul Ma'rifah and Ahmad Ajib Ridlwan, 'Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien Di LAZNAS IZI Jawa Timur', *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Inovation*, 2.1 (2022), pp. 1–17.

² Khodijah Ishak, 'Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1.1 (2012), p. 167.

sendiri sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat jika dipandang dari sudut pandang ajaran islam. Hal tersebut juga bisa dijadikan bukti sejarah perkembangan umat islam yang diawali dengan masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Dimana lembaga zakat disebut dengan *Baitul Maal* yang berfungsi untuk mengelola keuangan negara. Sumber dan pemasukannya berasal dari zakat, infaq dan shadaqah.

Pemberdayaan dana ZIS bisa diterapkan dalam dua bentuk yaitu bisa berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi. Berbasis sosial bisa dilakukan dalam bentuk pemberian santunan sebagai bentuk memenuhi kebutuhan para mustahik, sedangkan pemberian dana berbasis pengembangan ekonomi dapat dilakukan dalam bentuk pemberian dana untuk dijadikan modal usaha kepada mustahik dan diberi arahan pada usaha ekonomi kreatif dan diharapkan hasilnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha.³

Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 terkait pengelolaan zakat yang berhubungan dengan pengumpulan zakat juga sudah dijelaskan bahwasanya pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat atau

³ Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan, and Hafas Furqani, 'Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST' (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh), *Journal of Sharia Economics*, 1.2 (2020), 160–76.

lembaga amil zakat yang telah dibentuk serta telah disahkan oleh pemerintah, salah satunya lembaga ZIS⁴.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha di setiap sektor ekonomi.⁵ Pentingnya usaha mikro kecil dan menengah dalam dunia perekonomian nasional bukan hanya karena jumlahnya yang banyak tapi juga dalam hal kemampuan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak.

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah suatu alternatif yang dipilih oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi angka pengangguran, mengatasi kemiskinan dan kesetaraan pendapatan⁶. Mengingat peran strategis dari UMKM ini dan masih terdapat keterbatasan dalam pengembangannya, maka saat ini pengembangan usaha kecil ini masih dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan atau pendapatan ekonomi. Dalam penelitian yang berjudul pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif dengan pendekatan CIBEST (Studi kasus LAZISNU Klaten). Terdapat perubahan pendapatan mustahik dan klasifikasi rumah tangga mustahik penerima bantuan zakat produktif.

⁴ Suprihantosa Sugiarto and Nurul Aulia Febriyani, 'Model Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin Nu Peduli', (ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam), Tahun 2021, Hlm 115.

⁵ Bachtiar Rifa'i, 'Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupatem Sidoarjo', *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1.1 (2013), pp. 130–36 <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-16/Bachtiar_KMP_V1_N1_Jan-April_2013.pdf>.

⁶ Nur Awwalunnisa, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat', *Iqtishaduna*, 12.1 (2021), pp. 29–47, doi:10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283.

Berdasarkan hasil pra survey yang didapatkan oleh peneliti, kendala yang dihadapi oleh beberapa mustahik ialah dari segi pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan ada yang mengalami perubahan ada yang stagnan. Maka dari itu diperlukan pendampingan berupa pengarahan ataupun membantu serta mendukung kelompok UMKM terkait permasalahan yang dihadapi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dalam pengembangan usaha⁷.

Dengan adanya permasalahan tersebut, LAZISNU PWNU Jawa Barat yang juga merupakan lembaga ZIS ikut andil dalam mendorong masyarakat UMKM untuk meningkatkan usahanya dengan memberikan modal ataupun tambahan usaha yang diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik utamanya di bidang ekonomi.

Program pemberdayaan UMKM di LAZISNU PWNU Jawa Barat ini berdiri pada tahun 2022. Dengan jumlah penerima bantuan modal usaha sebanyak 6 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Usaha yang dijalankan pelaku UMKM, seperti pedagang kaki lima, pedagang nasi kuning, pedagang kupat tahu, pedagang bubur ayam, pedagang mie bakso dan pedagang buah-buahan dan jenis lainnya.

Berdasarkan hasil pra survey dengan mewawancarai para pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha tersebut bernama Ibu Caca, bapak Damin dan bapak Iang terdapat perbedaan pendapat. Menurut ibu Caca

⁷ Wawancara dengan Ibu Dinda selaku Staff Bidang Sumber Daya Manusia LAZISNU PWNU Jawa Barat

sebagai pedagang jajanan kaki lima sejak 2018 sempat berhenti dikarenakan terdapat efek pandemi corona di tahun 2020, mendapatkan bantuan modal usaha pada bulan juni tahun 2022 berupa sejumlah uang tunai. Menurut bapak Damin selaku penjual nasi kuning mendapat bantuan uang tunai sebagai modal usaha namun tidak diberikan pembinaan dalam mengelola usaha sehingga usaha yang dijalankan stagnan. Menurut bapak iang yang bekerja sebagai penjual buah-buahan mendapatkan bantuan tambahan modal usaha berupa uang tunai serta diberikan arahan dalam menjalankan usaha serta cara menentukan buah yang layak jual sehingga mengalami kenaikan penjualan.

Dalam pemberdayaan UMKM, LAZISNU memberikan bantuan modal usaha melalui pembinaan dana usaha kepada individu ataupun kelompok usaha mustahik. dalam hal penyalurannya LAZISNU PWNJ Jawa Barat melakukan survei dan wawancara sederhana kepada penerima manfaat lalu setelahnya diberikan bantuan usaha, yang mana setelah bantuan usaha diberikan lazisnu hanya melakukan pemantauan dengan mengukur apakah mampu tidaknya mustahik nantinya menyisihkan hasil usahanya untuk dizakatkan nantinya.

Kategori kemiskinan menurut metode CIBEST Suatu rumah tangga/ keluarga dikatakan mampu secara material apabila pendapatan mereka berada di atas nilai MV (*material value*). Demikian pula sebaliknya, rumah tangga/ keluarga dikatakan miskin secara materil apabila pendapatan mereka berada di bawah nilai MV. Nilai MV ini dapat didasarkan pada nilai standar garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (dalam hal ini BPS) atau

didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Indeks CIBEST ini mencoba menghitung jumlah penduduk yang berada di masing-masing kuadran dan implikasinya terhadap kebijakan pemerintah. Fokus kebutuhan yang perlu dihitung adalah kebutuhan materil dan spiritual⁸.

Salah satu bentuk pengukuran pemberdayaan penerima manfaat usaha mikro adalah dengan menggunakan pendekatan CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*). CIBEST merupakan metode baru yang mengukur kemiskinan dari perspektif islam dengan menyelaraskan aspek material dan spiritual⁹. Teori ini dikembangkan oleh Beik dan Arsyanti pada tahun 2016 dengan membentuk kuadran CIBEST yang terdiri dari kuadran ke-1 (sejahtera), kuadran ke-2 (kemiskinan material), kuadran ke-3 (kemiskinan spiritual) dan kuadran ke-4 (kemiskinan absolut). Pembagian tersebut didasarkan kepada kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual¹⁰.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga filantropi LAZISNU memiliki andil dalam pemberdayaan penerima manfaat usaha mikro di Jawa Barat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik

⁸ Muhammad Afthon Ashar and Muhammad Nafik Hadi Ryandono, 'Implementasi Metode Cibest (Center of Islamic Business and Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Surabaya 1', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.5 (2020), p. 1057, doi:10.20473/vol6iss20195pp1057-1071.

⁹ Andini putri J, Ayu Ruqayyah Yunus, and A. Syathir Sofyan, 'Analisis Kaji Dampak Program Bunda Bisa Pada Laznas Yatim Mandiri Makassar Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Model Cibest', *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*, 3.3 (2023), pp. 1–20, doi:10.24252/attawazun.v3i3.42805.

¹⁰ Nur Havivah and Mahyuni, 'PENGUKURAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN BERDASARKAN CIBEST MODEL (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banjar)', *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 2.2 (2022), pp. 187–96, doi:10.31961/ijaaf.v2i2.1590.

untuk melakukan penelitian ini dengan judul **Analisis Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Pemberdayaan Usaha Mikro di LAZISNU PWNU Jawa Barat.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro LAZISNU PWNU Jawa Barat?
2. Bagaimana Tingkat Keberhasilan LAZISNU PWNU Jawa Barat Dalam Mengubah Status Penerima Manfaat Yang Berasal Dari Miskin Material Kepada Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai :

1. Mengetahui Pendayagunaan Dana ZIS dalam Pemberdayaan Usaha Mikro LAZISNU PWNU Jawa Barat.
2. Mengetahui Tingkat Keberhasilan LAZISNU PWNU Jawa Barat Dalam Mengubah Status Penerima Manfaat yang Berasal Dari Miskin Material Kepada Sejahtera.

D. Kegunaan Penelitian

Disamping memiliki tujuan yang dijabarkan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa kegunaan atau manfaat diantaranya :

- a. Secara teoritis

1. Memperkaya *khazanah* pengetahuan serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan ekonomi syariah tersendiri terkait pendayagunaan dana ZIS terkhusus dalam pemberdayaan usaha mikro.
 2. Menambah wawasan dalam memahami pemberdayaan usaha mikro yang sesungguhnya.
- b. Secara Praktis
1. Bagi masyarakat, dengan memberikan informasi tentang pendayagunaan dana ZIS di LAZISNU PWNNU Jawa Barat.
 2. Bagi Penulis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang pendayagunaan dana ZIS di LAZISNU PWNNU Jawa Barat yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro di Jawa Barat. Selain itu, sebagai salah satu syarat mencapai gelar S.E pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.
 3. Bagi Lembaga filantropi yaitu untuk lebih meningkatkan peran lembaga dalam pemberdayaan usaha mikro di Jawa Barat